

# KESEMPATAN KERJA SUB-SEKTOR PERIKANAN ADALAH SELUAS LAUTAN YANG DAPAT DIJANGKAU\*

B. DARUS

## PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia dengan pantai yang terpanjang di seluruh dunia terletak di lintas strategis Benua Asia dan Australia dan diapit oleh dua samudra Pasifik dan Indonesia. Sumber daya alam hayati serta potensi ekonomi perairan pantai, Zona Ekonomi Eksklusif 200 Mil dan lautan bebas perlu ditata secara tuntas di dalam Pelita IV dengan perencanaan sumber daya manusia.

Keppres 39/1980 adalah keputusan politik yang tepat guna menyelesaikan kebingungan pola pengembangan perikanan yang telah menyebabkan konflik sosial ekonomi antara nelayan tradisional dan pukat harimau yang berlarut-larut. Semangat Keppres itu adalah pada hakikatnya penyediaan dan perlindungan sumber daya alam hayati bagi rakyat kecil yang mendiami desa pantai. Makna yang terkandung di dalamnya ialah jalur pemerataan tidak lengkap bila tidak dibarengi dengan pemerataan penyediaan sumber daya alam nabati dan hayati bagi rakyat kecil di pedesaan. Keputusan politik itu telah dilengkapi pula dengan rancangan GBHN Pelita IV yakni pembangunan perikanan rakyat akan dilakukan dengan pendekatan pembangunan desa pantai.

Keputusan yang sama telah dilakukan Norwegia ketika mereka memutuskan tidak menjadi anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) demi melindungi perairannya dari garapan anggota MEE lainnya.

Dengan Keppres 39/1980 dan Deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif 200 Mil itu, hak nasional telah ditegakkan dan teori lautan sebagai milik bersama

---

\*Karangan ini adalah hasil ramuan dan renungan penulis setelah mengikuti *Lokakarya Sosial Ekonomi Nelayan Indonesia* yang diselenggarakan oleh Puslitbang Perikanan di Cisarua, 2-4 Nopember 1982, di mana penulis menyajikan sebuah makalah yang berjudul "Pengaruh Penghapusan Trawler di Sumatera Utara." Penulis adalah Direktur Lembaga Riset Fakultas Ekonomi USU, Medan.

yang kolot ataupun purbasangka tetapi memang sebenarnya keadaan setempat tidak cocok. Nasib yang sama dialami oleh Indo-Norwegian Project Cochin India. Penulis sendiri telah mengunjungi proyek itu bulan Juni 1978. Smith, Ian R. (1979) dalam karyanya berjudul, "A Research Framework for Traditional Fisheries" menyebutkan bahwa ada kaitan nyata antara program pembangunan dan upaya riset pendukung. Apabila sasaran program pembangunan perikanan adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan tradisional, sasaran riset ialah memperluas dan menjernihkan pilihan yang tersedia bagi para penentu keputusan, apakah pemerintah, manajer proyek, wiraswasta ataupun nelayan itu sendiri. Ia menganjurkan betapa pentingnya perspektif holistik baik untuk pembangunan perikanan maupun masyarakatnya.

Dalam Seminar Nelayan Asia I yang diselenggarakan oleh FAO/UNDP di Bangkok, Mei 1978 dan dihadiri oleh nelayan tradisional Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Jepang (bebas tidak mewakili organisasi) dan penulis turut serta, telah dibicarakan tentang "South China Sea Fishery Project." Proyek ini disponsori Multinational Corporation (MNC) untuk menggarap lautan ASEAN. Seminar memrotes proyek itu karena tidak ada manfaatnya untuk nelayan tradisional ASEAN. Kita jangan terkecoh dengan dalih lautan sudah jenuh dan nelayan tradisional harus dipindahkan ke sektor pertanian atau pertambakan. Bill Collier (1977) berkeyakinan bahwa sebagian besar nelayan tradisional di Jawa tidak mudah tertarik sebagai tenaga pekerja penuh di pertambakan padat modal yang memerlukan tenaga kerja sedikit. Cordell (1977) menyimpulkan apa yang dilihatnya di tenggara Brazil bahwa perikanan tradisional adalah sumber penghidupan terakhir. Gejala ini juga terlihat di Asia yakni: "Fishing is a last resort activity for many."

#### ANDIL LAUTAN TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA

Produksi hasil laut merupakan komponen sumbangan sektor pertanian terhadap GDP (Produksi Domestik Kotor). Sisa konsumsi protein itu diekspor dan telah pernah memberikan sumbangan pendapatan devisa negara sebesar US\$ 280 juta tahun 1980.

Namun kesempatan kerja seolah-olah tertutup, karena sementara anggapan bahwa lautan sudah jenuh. Pertambahan tenaga kerja di sub-sektor perikanan akan menurunkan produktivitas nelayan yang memang sudah menurun. Pengangguran warga desa pantai semakin meningkat, keresahan dan konflik sosial mencapai puncaknya berupa konflik fisik disertai dengan pertumpahan darah. Padahal penurunan produktivitas perkesatuan ikhtiar pe-

## ASPEK POSITIF PENGHAPUSAN PUKAT HARIMAU DI SUMATERA UTARA

Operasi Pukat Harimau dihapuskan di Sumatera Utara terhitung 1 Januari 1981. Volume ekspor udang segar tahun 1971 menurut catatan Bank Indonesia menurun 62,03% (8.896 ton tahun 1980 dan 3.370 ton tahun 1981) dan nilainya menurun 43,08% (US\$ 32.312.000 tahun 1980 dan US\$ 18.404.000 tahun 1981). Dua kuartal pertama tahun 1982 dibandingkan dengan 2 kuartal pertama 1981, volume ekspor udang segar meningkat 20,48% (1.475 ton) dan nilainya juga meningkat 5,21% (US\$ 8,27 juta).

Peningkatan volume ekspor itu disebabkan oleh motorisasi bina massal perahu bermotor nelayan tradisional akhir tahun 1981 oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 1.509 unit di Selat Malaka dan 418 unit di perairan Lautan Indonesia. Sedangkan rencana motorisasi 1981/1982 adalah 4.305 unit. Bila 1.927 unit telah mampu meningkatkan volume ekspor sebesar 20,48% dari penurunan volume 62,08% akibat penghapusan pukat harimau sejumlah 600 unit, maka motorisasi sisa rencana sebesar 2.378 unit akan mampu meningkatkan volume ekspor udang segar  $\pm 25\%$  lagi. Sisa 16,60% akan diisi oleh  $\pm 1.353$  unit perahu bermotor berikutnya.

Kesimpulannya ialah produktivitas 600 trawler udang sama dengan produktivitas  $\pm 5.658$  unit perahu bermotor yang menggunakan *trammelnet*. Perbandingan kesempatan kerja antara keduanya ialah 600 trawler x 5 orang = 3.000 orang, sedangkan 5.658 perahu bermotor x 3 orang = 16.978 orang nelayan. Jumlah perahu tanpa motor tahun 1980 tercatat 15.098 unit yang siap untuk dimotorisasi. Dari aspek perbandingan investasi per tenaga kerja, perahu bermotor lebih rendah daripada trawler yakni:

$$600 \text{ trawler} \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \frac{\text{Rp } 15 \text{ milyar}}{3.000} = \text{Rp } 5.000.000,00$$

$$\text{dan perahu bermotor} \quad \frac{\text{Rp } 7,92 \text{ milyar}}{16.978} = \text{Rp } 460.000,00$$

(investasi perahu bermotor 16.978 orang x Rp 1,4 juta = Rp 7,92 milyar).

Dengan demikian tidak beralasan bila masih banyak pihak yang ragu tentang daya guna Keppres 39/1980 ditinjau dari aspek sosial ekonomi.

## PENATAAN KEMBALI STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN

Dengan tujuan pembangunan perikanan untuk membangun manusia seutuhnya, pengelolaan kekayaan sumber daya alam logis didekati dari kepen-

Dengan pembagian tugas yang tepat antara pemerintah sebagai penentu strategi dan perencanaan, pendukung prasarana dan sarana penunjang berikut penyuluhan teknis dan teknologis, perguruan tinggi melalui penelitian sosial ekonomi dan antropologi, perusahaan negara, swasta dan koperasi mengelola manajemen bisnis kekayaan laut guna diterjemahkan ke dalam rangkaian wujud manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Dari ketiga manajemen organisasi bisnis itu, manajemen koperasi yang paling menantang dan rumit.

### MANAJEMEN KOPERASI

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perikanan dan Dirjen Koperasi Juli 1982, pengelolaan motorisasi bina massal nelayan tradisional disalurkan melalui KUD-MINA dengan koordinasi PUSKUD-MINA dan nelayan tidak lagi langsung sebagai penerima kredit. KUD-MINA mengatur pengembalian cicilan. Perlu diperhatikan bahwa hal itu baru mungkin terjadi bila arus produksi dan arus uang berlangsung melalui KUD.

Membina satuan kelompok nelayan harus mampu melayani manajemen pemasaran, produksi, sumber daya manusia dan keuangan sekaligus. Kesemuanya itu mensyaratkan bahwa manajer harus mampu mengadministrasikan hasil produksi setiap nelayan setiap hari agar nelayan mengetahui posisi kreditnya setiap saat. Nelayan lebih ingin mendapat sedikit laba tetapi juga sedikit risiko daripada besar laba dalam waktu yang akan datang tetapi risikonya juga besar. Pendirian Dirjen Perikanan yang ingin terjalannya kerja sama antara swasta (cold storage) sebagai bapak angkat atau Proyek Inti Rakyat (PIR) kelompok nelayan anggota koperasi patut dihargai. Karena dengan demikian KUD dapat belajar dari swasta hingga tiba saatnya KUD itu lepas landas dan berdiri sendiri. Melalui jenjang agribisnis, KUD menangani sub-sistem produksi dan swasta menangani sub-sistem pengolahan dan pemasaran. Namun anggapan sementara pihak bahwa peranan pedagang pengumpul (tengkulak) adalah parasit perlu dikaji lebih mendalam. Jauh sebelum lembaga-lembaga pemerintah datang membina nelayan, pedagang pengumpul pada hakikatnya adalah manajer yang mengurus kepentingan nelayan termasuk masa paceklik. Nelayan dan keluarganya harus hidup 360 hari setahun sedangkan hari kerja produktif mereka hanya 200 sampai dengan 250 hari setahun. Jangan dikaburkan peranan KUD sebagai sarana pembinaan menjelma menjadi tujuan. Tujuan adalah peningkatan kesejahteraan nelayan melalui fungsi harga. Persentase harga konsumen yang diterima produsen (nelayan) menjadi indikator perbaikan sosial-ekonomi mereka. Peranan pedagang pengumpul di pantai dan pengecer di kota-kota penting dalam ilmu dan faktor praktek marketing. Jangan kita terjebak ingin menghancurkan kapitalis kecil desa yang tergolong ekonomi lemah itu sebagai salah satu setan desa. Padahal kita membiarkan